BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila diarahkan agar negara dan bangsa mampu membiayai pembangunan nasional dari sumber penerimaan dalam negeri. Keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung dari peran serta dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat bersama dengan pemerintah. Oleh karena itulah diperlukan sikap mental, tekad, dan semangat serta disiplin yang tinggi dari seluruh warga negara Indonesia.

Salah satu peran serta masyarakat di dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan memenuhi kewajiban perpajakannya. Menyadari begitu besarnya peranan pajak dalam membiayai pembangunan ini, maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan upaya penyempurnaan peraturan perpajakan untuk memberikan kemudahan dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Sebagai upaya dalam penyempurnaan peraturan perpajakan ini, pemerintah melakukan perubahan sistem pajak dari Official Assesment System menjadi Self Assesment System. Di mana dalam self Assesment system ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional dengan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang tertutang.

Sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

Pada Hakekatnya pembayaran pajak ini merupakan salah satu sarana perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya.

Salah satu prosedur perpajakan yang dapat membantu dalam upaya peningkatan penerimaan kas negara adalah prosedur SPT Masa yang merupakan surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dalam suatu pajak atau pada suatu saat.

SPT ini juga merupakan suatu sarana bagi aparat pajak (*fiscus*) untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Di mana dengan adanya SPT ini dapat diketahui sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Kepatuhan ini juga sangat mempengaruhi pada peningkatan pembayaran penerimaan pajak.

Mengingat pentingnya prosedur pengolahan SPT ini serta peranannya bagi peningkatan penerimaan pajak, maka penulis mencoba untuk menguraikannya dalam tulisan dengan judul " **PROSEDUR PENGOLAHAN SPT MASA PPh PASAL 25 BADAN dan PERANANNYA TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PURWAKARTA** "

1.2. Maksud dan Tujuan Penulisan

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan tujuan penulisan serta gambaran masalah yang akan diungkapkan adalah sebagai berikut ;

1. Untuk memperoleh gambaran mengenai prosedur pengolahan SPT masa PPh Pasal 25 Badan di KPP Purwakarta ;
2. Untuk mengetahui tata cara pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 25 ;
3. Untuk mengetahui sejauh mana peranan prosedur pengolahan SPT masa PPh Pasal 25 Badan tersebut terhadap peningkatan penerimaan Pajak di KPP Purwakarta ; dan
4. Untuk memperdalam wawasan penulis tentang perpajakan.

1.3. Ruang Lingkup Pokok Bahasan

Untuk lebih jelas dan memahami bagaimana prosedur pengolahan SPT masa PPh Pasal 25 Badan dan peranannya terhadap peningkatan penerimaan pajak, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas.

1. Bagaimana prosedur pengolahan SPT masa PPh Pasal 25 Badan di KPP Purwakarta
2. Bagaimana tata cara pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 25 ini
3. Sanksi perpajakan yang dikenakan terhadap wajib pajak bila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya
4. Bagaimanakah peranan prosedur pengolahan SPT Masa PPh Pasal 25 Badan terhadap peningkatan penerimaan pembayaran pajak di KPP Purwakarta.

1.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh serta mengumpulkan data-data mengenai laporan ini penulis menggunakan beberapa teknik, diantaranya ;

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

   Dalam metode ini penulis mengumpulkan data dengan membaca dan memperlajari buku-buku yang berhubungan dengan pokok bahasan kerja pratek ini.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

   Penulis melakukan penelitian dengan mengawasi, mengamati, dan memperhatikan praktek-praktek kerja secara langsung pada Seksi PPh Badan di KPP Purwakarta.

3. Metode Wawancara

   Dalam metode ini penulis mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan pejabat yang berwenang dan kepada petugas secara langsung.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam tugas akhir ini secara umum terbagi menjadi lima bagian, diantaranya ;

BAB I PENDAHULUAN

Diuraikan mengenai latar belakang,maksud, dan tujuan penulisan, ruang lingkup pokok bahasan, dan metode pengumpulan data serta diterangkan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan. Seperti pengertian pajak, fungsi pajak, dan azas serta sistem pemungutan pajak.

BAB III DATA HASIL PENELITIAN

Diuraikan mengenai data-data hasil penelitian yang dilaksanakan di tempat kerja praktek yang meliputi, sejarah tempat praktek, struktur organisasi, uraian tugas, dan inti bahasan dari laporan ini.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Diuraikan mengenai peranan pengolahan SPT Masa terhadap peningkatan penerimaan pajak serta kendala-kendala yang timbul dan cara pemecahannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini penulis mencoba untuk menyimpulkan dari tugas akhir ini sekaligus memberikan saran untuk memecahkan masalah yang dibahas.